

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku – Buku

- Effendi Tolib, 2015, *Hukum Pidana internasional*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Parthiana I Wayan, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- Sunarso Siwanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Dumoli Agusman Damos, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nasution Bader Jonan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Atmasasmita Romli, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Mitra Utama, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- United Nations (b). Nations Office on Drug and Crime, *Revised Mutual on the Model Treaty in Extradition and on the Model Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

\_\_\_\_\_, 2000, Convention against Transnational Organized Crime,  
Palermo.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal  
Balik dalam Masalah Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi  
PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian  
Internasional.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi  
PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

### 3. Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Central Authority dan  
Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik  
dalam Masalah Pidana*

Pratikno Yudi, 2007, *Analisis dan Evluasi Undang-undang No.1 Tahun 2006  
tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Disertasi,  
Unifersitas Padjajaran, Bandung.*

Prasasthi Svetlana Anggita, 2011, *Upaya Pemerintah Republik Indonesia  
dalam Bantuan Hukum Timbal Balik untuk Masalah Pidana (Mutual  
Legal Assistance – MLA) Terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri  
Hasil Tindak Pidana Korupsi (Stolen Asset Recovery), Jurnal Hukum  
Volume 2*

<http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC,loc.Cit>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  
<http://portal.ahu.web.id/publikasi/berita/berita-sabh/itemlist/user/345humasditjenahu?start=116>

Association of Southeast Asian Nations, 2008, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta.

Atmasasmita Romli, "Jurnal", *Asset Recovery dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*.

\_\_\_\_\_, 2007, *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific: Frameworks and Practice in 27 Asians and Pacific Jurisdiction: Thematic Review-Preliminary Report*

Husein Yunus, 2008, *Kerjasama Internasional dalam pembekuan, penyitaan dan pengambilan aset tindak pidana korupsi*, Lokakarya BPHN-UNDIP.